Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik
Volume. 1 No. 3 September 2024
e-ISSN : 3063-122X, dan p-ISSN : 3063-1238, Hal. 195-205
DOI: https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.118
Available online at: *https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer*

Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Alhadi, Sunarto, Alamsyah
[1,2,3]Universitas Tamansiswa Palembang
Alamat: Jl. Tamansiswa No. 261 (Lapangan Hatta) Ilir Timur I Kota Palembang
Korespondensi penulis: alhadi@unitaspalembang.ac.id

Abstract ; Alhadi, The Role of the People's Welfare Section in Supporting the Performance of the Banyuasin Regency Regional Secretariat. This study aims to describe the role of the People's Welfare Section in Supporting the Performance of the Regional Secretariat of Banyuasin Regency. This research was conducted for three months using a quantitative approach. Data was collected through questionnaires, observation, and documentation. Data analysis techniques were carried out by presenting data, reducing data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of the People's Welfare Section in Supporting the Regional Secretariat of Banyuasin Regency has not run optimally this is due to the lack of coordination with other agencies that are still related to programs from Welfare, such as Baznas and others. The supporting factors for the role of the Welfare section of the Banyuasin Regency Secretariat itself are employees who work according to the rules, in this case the main tasks and functions of each section that have been determined. While the inhibiting factor in this research is the lack of strong coordination between the Welfare section and agencies that are directly related to the welfare of the people, for example those related to Baznas, Hajj and Umrah and Tahfidz and others. In the future it needs to be improved again.
Keywords: : Role, Performance of Regional Secretariat, Public Welfare

Abstrak ; Alhadi, Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang masih terkait dengan program dari Kesejahteraan, seperti Baznas dan lain-lain. Faktor pendukung peran bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin sendiri adalah pegawai yang bekerja sesuai aturan, dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum terjalinnya koordinasi yang kuat antara bagian Kesejahteraan Rakyat dengan instansi yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, misalnya yang terkait dengan Baznas, Haji dan Umrah serta Tahfidz dan lain sebagainya. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi.
Kata Kunci: Peran, Kinerja Sekretariat Daerah, Kesejahteraan Rakyat

PENDAHULUAN

Konsep kesejahteraan masyarakat telah berkembang melampaui sekadar ukuran pendapatan nominal. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kesejahteraan melibatkan beberapa dimensi utama: standard living (tingkat hidup), wellbeing (kesejahteraan), welfare (kesejahteraan sosial), dan quality of life (kualitas hidup).

Menurut Brudeseth (2015), kesejahteraan didefinisikan sebagai kualitas kepuasan hidup yang mencerminkan posisi seseorang dalam mencapai keseimbangan hidup yang optimal. Kesejahteraan ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

Received: Juni 19, 2024; Revised: Juli 25, 2024; Accepted: Agustus 30, 2024 ; Published: September 15, 2024;
* Alhadi, alhadi@unitaspalembang.ac.id

1. **Kesejahteraan Materi**: Ini merujuk pada kondisi ekonomi dan kepemilikan material, termasuk pendapatan, aset, dan akses terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. **Kesejahteraan Bermasyarakat**: Mengacu pada kualitas hubungan sosial dan integrasi individu dalam komunitas, termasuk dukungan sosial dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.
3. **Kesejahteraan Emosi**: Berhubungan dengan keadaan psikologis dan perasaan individu, seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan keseimbangan emosional.
4. **Keamanan**: Mengukur tingkat perlindungan dari ancaman eksternal, termasuk keamanan fisik, sosial, dan ekonomi.

Dalam kajian organisasi ekonomi keluarga, kesejahteraan sering diukur dengan indikator seperti permintaan terhadap barang strategis dan proporsi pengeluaran untuk pangan. Indikator ini membantu menilai sejauh mana kebutuhan dasar terpenuhi dan sejauh mana nilai-nilai hidup dapat direalisasikan.

Kesejahteraan sosial keluarga mencakup kemampuan untuk melahirkan individu yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengertian kesejahteraan sosial sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan manfaat dan jasa yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang krusial bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial mencerminkan upaya sistematis suatu bangsa dalam memastikan bahwa anggotanya memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik.

Implementasi Bagian Kesra sebagai organisasi supporting staff dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek penting, salah satunya adalah mekanisme tata kerja. Tata kerja ini mencakup pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing unit dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Mekanisme tata kerja mencerminkan bagaimana setiap unit organisasi berinteraksi dan berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Pengaturan ini sangat penting untuk meminimalisir overlap atau konflik tugas yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi operasional. Tata kerja yang baik harus mencakup proses yang jelas untuk setiap unit dalam organisasi, menetapkan tanggung jawab, serta alur komunikasi yang efektif.

Namun, dalam praktiknya, implementasi tata kerja di Bagian Kesra sering menghadapi tantangan. Meskipun terdapat pedoman dalam Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang seharusnya mengatur tata kerja Bagian Kesra, kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih belum optimal. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk:

1. **Kurangnya Koordinasi**: Ketidakjelasan atau ketidakcukupan dalam koordinasi antar unit dapat mengakibatkan overlapping atau kesenjangan dalam pelaksanaan tugas.
2. **Pengaturan Tugas yang Tidak Efisien**: Tugas-tugas yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang dan menurunkan produktivitas.

3. **Kurangnya Pemahaman Terhadap Tata Kerja**: Anggota organisasi mungkin tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang dapat mengakibatkan implementasi yang tidak konsisten.
4. **Masalah dalam Sistem Monitoring**: Tanpa sistem pemantauan yang efektif, sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk meningkatkan efektivitas Bagian Kesra dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan perbaikan dalam mekanisme tata kerja. Ini meliputi penguatan koordinasi antar unit, penyusunan ulang pengaturan tugas yang lebih efisien, peningkatan pemahaman tentang tata kerja di kalangan anggota organisasi, dan pengembangan sistem monitoring yang efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bagian Kesra dapat lebih optimal dalam melaksanakan perannya sebagai supporting staff dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Walaupun demikian, Bagian Kesra melaksanakan tupoksinya berpedoman pada peraturan yang ada. Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, maka tugas Bagian Kesra menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c. Sub Bagian Kesejahteraan masyarakat

Beberapa capaian yang ada di Kesra yaitu capaian Indikator Generasi Muda Hafiz Al-Qur'an telah mencapai target capaian 100% dengan program kegiatan Pelaksanaan STQ/MTQ dengan target 285 orang dan dapat terealisasi 886 orang peserta terbaik mendapat 311% peserta terbaik yang didapat. Capaian Indikator Masyarakat Khatam Qur'an telah mencapai target capaian 100% dengan program pelaksanaan Wisuda Santri LPPTKA BKPRMI dengan target 2500 orang santri terealisasi sebanyak 2652 orang wisudawan Santri di tahun 2020 mencapai 106% peserta Khatam Qur'an.

Peningkatan pembayaran Zakat dan Infak melalui BAZNAS hanya mencapai 20% dari target 40%, hal ini dipengaruhi oleh faktor :

1. Kurangnya kesadaran bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin membayar Zakat, Infak dan Shadaqoh melalui BAZNAS
2. Kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat tentang membayar zakat, infak dan Shadaqoh
3. Religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat Langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara)
4. Pelayanan (Pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan

Adapun untuk meningkatkan persentase peningkatan penerima Zakat dan Infak melalui BAZNAS, dengan cara :

1. Pelayanan BAZNAS harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat merasa nyaman dan lebih tertarikmembayar zakat di BAZNAS
2. Manajemen dana zakat dikelola secara transparan/terbuka agar masyarakat lebih termotivasi
3. Lokasi dan tempat untuk promosi dan sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat harus ditingkatkan
4. BAZNAS dalam pengelolaan zakat harus bekerja secara professional

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengakibatkan kinerjanya belum optimal. Salah satu masalah utama adalah tidak

adanya sinkronisasi yang baik antara Bagian Organisasi dan Bagian Kesra. Ketidakcocokan ini seringkali mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Selain itu, adanya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kerancuan dalam penafsiran. Jika Tupoksi tidak ditafsirkan dengan hati-hati, hal ini dapat mengakibatkan overlapping atau tumpang tindih antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya, yang pada gilirannya mengganggu kelancaran operasional dan mempengaruhi efisiensi kerja.

Masalah lain yang signifikan adalah penumpukan beban kerja, terutama terkait dengan tim pertimbangan izin tempat ibadah. Ketika ada anggota tim yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini menyebabkan penumpukan pekerjaan dan memperlambat proses pengeluaran izin, yang dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Koordinasi yang lemah antara Bagian Kesra dan instansi terkait juga menjadi masalah utama. Koordinasi yang tidak efektif dapat menghambat sinergi yang diperlukan dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat, mengakibatkan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, situasi pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak negatif terhadap kinerja pegawai Kesra. Situasi ini tidak hanya mengganggu proses kerja tetapi juga menambah beban mental dan fisik bagi pegawai, yang berkontribusi pada penurunan produktivitas dan efektivitas dalam melaksanakan tugas.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperjelas dan menyempurnakan Tupoksi, meningkatkan koordinasi antara Bagian Kesra dan instansi terkait, serta mengelola beban kerja secara lebih efisien. Selain itu, perhatian khusus juga perlu diberikan untuk mendukung pegawai dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat situasi pandemi, guna memastikan kinerja yang optimal dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Akan tetapi bukan berari tidak ada capaian dari Bagian Kesra. Salah satu capaian yang telah dicapai pada tahun 2020 yaitu bahwa Generasi Muda Hafiz Al-Qur'an mencapai 886 peserta dari target 285 peserta, Masyarakat Khatam Qur'an telah mencapai 2652 santri dari target 2500 santri, Peningkatan Zakat dan Infak melalui BAZNAZ dari target 40% terealisasi mencapai 20% sehingga capaian yang di dapat mencapai 50%, terdapat penurunan capaian persentase yang diperoleh. Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran 1 Meningkatnya Aktivitas Keagamaan sebesar 155,6%.

Namun tidak semua hal berjalan dengan sesuai harapan hal ini tentu disebabkan banyak faktor yaitu sistem penempatan pegawai masih menggunakan sistem merit system bukan spoiled system sehingga dipromosikannya beberapa pegawai dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai di Bagian Kesra tidak diimbangi dengan masuknya pegawai di Bagian Kesra dengan tingkat pendidikan yang setara. Hal ini juga sangat berdampak terhadap rendahnya motivasi bekerja serta pelaksanaan tugas yang tidak diikuti dengan kerangka kerja berpikir (logical frame work), tetapi menjalankan tugas berdasarkan rutinitas dan tidak didukung oleh inovasi. Mekanisme anggaran ada beberapa kegiatan Bagian Kesra dalam Renstra yang tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemkab Banyuasin sehingga APBD dibuat model jatah dana / pagu anggaran (plotting anggaran).

Sehingga tidak sedikit dari SKPD yang berusaha untuk merubah beberapa kegiatan yang dirasa kurang bisa menghasilkan sisa anggaran yang besar. Sistem komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja Permasalahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi Bagian Kesra lebih kepada pihak eksternal. Seperti : Adanya penumpukan beban kerja mengenai tim pertimbangan ijin tempat ibadah di Bagian Kesra karena masing-masing anggota tim belum menyadari tupoksinya masing-masing dan ada beberapa anggota tim yang tergolong baru. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dari Pihak Pemkab. Atas dasar permasalahan tersebutlah peneliti ingin melakukan penelitian berjudul "**Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin"**

LANDASAN TEORI

Secara etimologi, istilah "kinerja" berasal dari kata "prestasi kerja" atau "performance". Menurut Mangkunegara (2005:67), kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Istilah ini mencakup dua aspek utama: kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dalam konteks ini, kinerja merujuk pada sejauh mana seorang individu berhasil memenuhi atau melebihi standar yang diharapkan dalam pekerjaannya. Kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir yang dicapai tetapi juga dari proses kerja yang dilakukan, termasuk bagaimana tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, kinerja melibatkan penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam menghasilkan output yang berkualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawabnya

Mangkunegara (2005:20) menjelaskan bahwa manajemen kinerja adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja. Proses ini melibatkan komunikasi yang berkelanjutan antara pimpinan dan karyawan, serta antara karyawan dengan atasan langsung. Tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pimpinan dan manajer meliputi beberapa aspek penting:

a. Mengurangi Keterlibatan dalam Semua Hal: Manajemen kinerja bertujuan untuk mengurangi keterlibatan manajer dalam setiap aspek operasional, sehingga mereka dapat fokus pada perencanaan strategis dan pengembangan organisasi.

b. Menghemat Waktu: Dengan memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan, manajemen kinerja membantu menghemat waktu, karena pegawai dapat membuat keputusan sendiri tanpa harus selalu bergantung pada atasan.

c. Kesatuan Pendapat dan Mengurangi Kesalahpahaman: Tujuan ini adalah untuk mencapai kesatuan pendapat di antara pegawai tentang tanggung jawab dan peran masing-masing, serta mengurangi kesalahpahaman mengenai siapa yang harus mengerjakan apa.

d. Mengurangi Frekuensi Situasi Informasi yang Tidak Tersedia: Manajemen kinerja juga berupaya untuk mengurangi situasi di mana atasan tidak memiliki informasi yang diperlukan pada saat dibutuhkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan.

e. Memperbaiki Kesalahan dan Identifikasi Penyebab: Dengan manajemen kinerja,

pegawai dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefisiensi, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Sementara itu, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai meliputi:

a. Memahami Tugas dan Kewenangan: Membantu pegawai untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan, mengapa hal tersebut penting, dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan.

b. Pengembangan Keahlian dan Kemampuan: Manajemen kinerja memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru yang relevan dengan pekerjaan mereka.

c. Mengenali Rintangan dan Kebutuhan: Memungkinkan pegawai untuk mengidentifikasi rintangan dalam peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.

d. Pemahaman Tugas dan Tanggung Jawab: Membantu pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif

Dalam kajian mengenai dimensi peran, terdapat beberapa pendekatan yang menguraikan bagaimana peran berfungsi dalam konteks sosial dan organisasi:

1. **Peran sebagai Suatu Kebijakan:** Dalam perspektif ini, peran dianggap sebagai kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Artinya, peran yang diambil seseorang atau suatu organisasi harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa tindakan yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang berlaku. Penerapan peran sebagai kebijakan berarti bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif.
2. **Peran sebagai Strategi:** Pendekatan ini melihat peran sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks ini, peran yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dirancang untuk menciptakan dukungan dan penerimaan dari masyarakat. Dengan kata lain, strategi ini melibatkan penggunaan peran secara aktif untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan serta sikap masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan yang dilaksanakan.
3. **Peran sebagai Alat Komunikasi:** Dalam pandangan ini, peran digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan dan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Peran di sini berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat. Dengan mendengarkan pandangan dan preferensi masyarakat, pihak yang berwenang dapat membuat keputusan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Konsep ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus melibatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Ketiga dimensi peran ini saling melengkapi dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana peran dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa: Dalam dimensi ini, peran berfungsi sebagai metode untuk mengurangi atau meredam konflik melalui pencapaian konsensus dari berbagai pendapat yang ada. Konsep ini berlandaskan pada asumsi bahwa interaksi dan

pertukaran pikiran antara pihak-pihak yang terlibat dapat meningkatkan pemahaman, toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan kerancuan. Dengan menggunakan peran sebagai alat penyelesaian sengketa, proses resolusi konflik difokuskan pada usaha untuk menemukan titik temu dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tercipta harmoni dan kerjasama yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan diskusi terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mengendalikan kembali semua masalah. Sesuai dengan tujuan penelitian, secara deskriptif kualitatif mengidentifikasi jenis penelitian yang digunakan penulis. Penelitian kualitatif pada dasarnya menjaga kemampuan orang lain di lingkungan untuk memahami mereka, dan mencoba memahami bahasa dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Ini juga dapat menggambarkan keadaan keseluruhan situasi, termasuk keadaan lingkungan saat ini, personel, dan alur kerja. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan memuat referensi data untuk memberikan gambaran tentang penyajian laporan. Data berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, file pribadi dan dokumen lainnya. Maka peneliti akan mencoba menjelaskan fakta yang ditemukan di bidang ini. Penelitian ini cenderung mengutamakan proses, oleh karena itu penelitian ini menganalisis bagaimana gambaran aktual tentang Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin”

a. Observasi

Kegiatan observasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pemantauan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian. Menurut Arikunto (2002: 28), observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis oleh peneliti dengan menggunakan instrumen penelitian yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mencatat dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan terstruktur.

b. Wawancara

. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan wawancara baru yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Melalui wawancara, kita bisa melihat Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin”

c. Dokumentasi

Sugiyono (2012: 240) mengatakan bahwa metode pencatatan merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Metode pencatatan merupakan informasi yang diperoleh dari catatan penting lembaga atau organisasi atau individu. Dokumen bisa dalam bentuk teks, gambar atau karya peringatan seseorang. Dokumentasi penelitian ini yaitu peneliti memperoleh dokumen, catatan, arsip dan laporan penelitian untuk mengevaluasi hasil penelitian

HASIL PENELITIAN

Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin

Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pegawai Bagian Kesra bekerja sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penerapan aturan dan kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan bahwa hasil kerja yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan organisasi

Sebagai Strategi

Sekretariat Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial tidak terdapat perbedaan antara Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Tahun 2020. Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dapat dilihat dalam laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Bagian Humas dalam menyusun strategi-strategi untuk mencapai kinerja maksimal dan target yang diinginkan sudah cukup baik. Bagian Kesra, yang menangani bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan kinerja yang baik dalam menyusun strategi dengan melibatkan diskusi bersama instansi-instansi terkait. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Sebagai Alat Komunikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang relevan, dapat ditegaskan bahwa kelemahan utama dalam Setda, khususnya di bagian Kesra, adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari instansi lain. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang tidak efektif antara Bagian Kesra dengan instansi terkait menyebabkan kurangnya integrasi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan. Selain itu, dukungan yang minim dari pihak lain juga menghambat pencapaian tujuan, karena Bagian Kesra memerlukan bantuan dalam bentuk sumber daya, informasi, dan kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kurangnya kerjasama yang baik antara Bagian Kesra dan instansi lain menyebabkan tumpang tindih tugas dan masalah koordinasi lainnya. Semua faktor ini berkontribusi pada kinerja yang tidak maksimal dari Bagian Kesra, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, dukungan, dan kerjasama untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam upaya kesejahteraan masyarakat.

Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dari dua hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Bagian Kesra dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada kemampuannya untuk memperkuat komunikasi dan melakukan koordinasi yang efektif. Bagian Kesra perlu mencari titik temu jika terdapat perbedaan pendapat antar instansi yang berhubungan dengan kesejahteraan, agar semua pihak dapat bekerjasama dengan harmonis. Dengan melakukan langkah-

langkah tersebut, Bagian Kesra akan lebih mampu mengatasi permasalahan dan konflik yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa upaya untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kerjasama yang solid dan komunikasi yang terbuka antar instansi terkait akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa salah satu faktor pendukung utama dari peran Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyuasin adalah keberadaan pegawai yang bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagaimana diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap pedoman ini membantu memastikan bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan peran mereka secara optimal, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kesra. Dengan pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, diharapkan kinerja Bagian Kesra dapat meningkat dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin menjadi lebih efektif.

Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam kinerja Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyuasin adalah kurangnya koordinasi yang terjalin antara Bagian Kesra dan instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti Baznas, Haji dan Umroh, serta lembaga tahfidz dan lainnya. Kelemahan dalam koordinasi ini menghambat efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk memperkuat kerjasama dan komunikasi antara Bagian Kesra dengan instansi terkait. Peningkatan koordinasi akan membantu memastikan bahwa program-program kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan lebih harmonis dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat..

Analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan kemudian dianalisis menggunakan teori peran maka dari keempat indikator yang ada dapat disimpulkan bahwa Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin khususnya dalam bidang kesejaheraan rakyat sudah cukup baik, namun ada beberapa masalah yang memang perlu diperbaiki khususnya persoalan koordinasi yang masih lemah dengan Lembaga dan bidang-bidang lain yang berhubungan langsung dengan Bagian Kesra. Kemudian dari sisi kualitas sumber daya manusia memang harus ada pengingkatan. Dan yang perlu dipertahankan adalah pegawai bekerja dengan mengikuti tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan.

KESIMPULAN

Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan bahwa Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daaerah Kabupaten Banyuasin belum berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh masih lemahnya sisi koordinasi dengan instansi lain yang masih ada keterkaitan dengan program dari Kesra, misalnya seperti Baznas dan lainnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Adapun faktor pendukung dari peran bagian Kesra Setda Kabupaten Banyuasin sendiri yaitu pegawai yang bekerja sesuai dengan aturan dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang telah ditentukan. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurang kuatnya koordinasi yang terjalin antara bagian Kesra dengan instansi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, misalnya yang berhubungan dengan Baznas, Haji dan Umroh serta Tahfidz serta lainnya. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, Mujiati, Sriathi. *2008*. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. *Uno*, Hamzah. *2008*. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta : Bumi. Aksara.

Budiman, Fajar dan Agus Irianto, *Pengaruh Motivasi Mengajar Guru Dan Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Sma Negeri Di Kota Bukittinggi*

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press.

Danim, sudarwan. *2011*. *Pengantar Pendidikan*. Bandung : ALFABETA

Daradjat, Zakiah. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daulay, Haidar Putra. 2012. *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa.* Jakarta: Rineka Cipta.

Dessler, Gary. *1997*. *Management Sumber Daya Manusia*. Terjemahan. Benyamin. Molan. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallind.

Engkoswara. *1986*. *Kecenderungan kehidupan di Indonesia menjelang tahun 2000 dan implikasinya terhadap sistem pendidikan*. Jakarta : Intermedia

Hakim, Lukman dan Armia, Chairuman. 2009. *Reformasi Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing.

Hamalik, Oemar. *2011*. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, M. *2003*. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara

Husaini Usman. 2009. *Motivasi Dalam Bekerja Karyawan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kusmianto. *1997*. *Panduan Penilaian Kinerja Guru Oleh Pengawas*. Jakarta : Erlangga,

Mathis.L.Robert *dan Jackson*.H.John. *2001*, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Jakarta : Buku kedua

Moleong, Lexy J, 2007 . *Metode Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Morgan, C.T. and King, R.A. *1986*. *Introduction to Psychology*. New York: McGraw-Hill Book Company.

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber*

Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press.
Mulyana, Dedy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya,* Bandung: Remaja Rosydakarya.
Mulyasana, Dedi. 2012. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
Prawirosentono, Suyadi. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
Rusmaini. 2011. *Ilmu Pendidikan*. Palembang: Grafika Telindo Press.
Sabirin. 2012. *Perencanaan Kepala Sekolah Tentang Pembelajaran*. Jurnal Tabularasa PPS Unimed, Volume 9, Nomor 1
Sanjaya, W. *2006*. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.
Septiana, R., *Ngadiman, & Ivada*, E. *2013*. Pengaruh Kepemimpinan Kepala. Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Wonosari
Slamet PH. *2000*. *"Karakteristik Kepala Sekolah Tangguh*.""Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (No. 025 tahun VI)
Sulistyono, *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi,* Teras, Jogjakarta, 2009
Sunarto dan Djumadi Purwoatmodjo. *2011*. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan. Kepala Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Iklim*
Supriyatno Triyo, *Marno*. *2008*. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Islam. Bandung: PT Refika Aditama
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1.
Whitmore, John. *1997*. *Coaching Performance*. Jakarta: Gramedia *Pustaka* Utama